
DIGITALISASI PELAPORAN, *ESG DISCLOSURE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL BERPENGARUH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Cindy¹; Anton Arisman²

Universitas Multi Data Palembang, Palembang^{1,2}

Email: cindy2226210001@mhs.mdp.ac.id¹; arisman@mdp.ac.id²

ABSTRAK

Riset ini bertujuan menguji pengaruh digitalisasi pelaporan, pengungkapan Environmental Social and Governance, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, riset ini menghasilkan 68 observasi dari 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien -0,080 dan signifikansi 0,009, mengonfirmasi bahwa peningkatan transparansi melalui sistem digital mampu menekan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, pengungkapan ESG, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Rendahnya koefisien determinasi sebesar 6% mengindikasikan kompleksitas fenomena penghindaran pajak yang memerlukan pendekatan multifaktor. Riset ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan teori keagenan dalam konteks perpajakan serta implikasi praktis bagi perusahaan, regulator, dan investor dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui transformasi digital dan penguatan mekanisme tata kelola perusahaan.

Kata Kunci : Digitalisasi Pelaporan; Pengungkapan ESG; Kepemilikan Institusional; Kepemilikan Manajerial; Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This research aims to testing the effect of reporting digitalization, Environmental Social and Governance disclosure, institutional ownership, and managerial ownership on tax avoidance in financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021-2024. Using a quantitative approach with purposive sampling technique, this research generated 68 observations from 17 companies that met the criteria. Multiple linear regression analysis shows that reporting digitalization has a significant negative effect on tax avoidance with a coefficient of -0.080 and significance of 0.009, confirming that increased transparency through digital systems can suppress tax avoidance practices. Conversely, ESG disclosure, institutional ownership, and managerial ownership showed no significant effect. The low coefficient of determination of 6% indicates the complexity of the tax avoidance phenomenon that requires a multifactor approach. This research provides theoretical contributions to the development of agency theory in the taxation context and practical implications for companies, regulators, and investors in designing strategies to improve tax compliance through digital transformation and strengthening corporate governance mechanisms.

Keywords : Reporting Digitalization; ESG Disclosure; Institutional Ownership; Managerial Ownership; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber pemasukan utama negara, pajak memegang peranan vital dalam menopang pembangunan dan operasional pemerintahan di Indonesia. Pentingnya penerimaan dari sektor perpajakan semakin terasa mengingat cita-cita pembangunan

berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah, di mana kontribusi pajak mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama keuangan nasional. Data tahun 2024 mencatat bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mencapai angka Rp 1.045,32 triliun, membuktikan bahwa pajak sesungguhnya adalah fondasi utama pembiayaan negara Indonesia. Meski demikian, dalam kenyataannya tidak sedikit perusahaan yang memandang pajak sebagai beban finansial sehingga memicu timbulnya upaya-upaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Praktik legal yang dirancang dalam menekan jumlah pajak dengan menggunakan kekosongan perpajakan yang ada telah menjadi perhatian dunia karena berpotensi menggerus pendapatan negara dan menciptakan ketimpangan dalam sistem fiskal (Adelia Kristina Manullang, 2024).

Akselerasi perkembangan teknologi informasi yang dipercepat oleh situasi pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai pihak, baik masyarakat maupun dunia usaha, untuk bertransisi menuju penggunaan platform digital. Transformasi digital ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas inklusivitas dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam ranah pelaporan keuangan dan administrasi perpajakan. Namun di sisi lain, digitalisasi juga membuka celah baru bagi terjadinya praktik penghindaran pajak yang lebih rumit dan canggih, khususnya yang melibatkan aset digital serta transaksi lintas negara. Dalam industri perbankan, kewajiban untuk menerapkan transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memelihara kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Tuntutan akan pelaksanaan keberlanjutan perusahaan dan penerapan tata kelola yang efektif kini semakin menguat melalui kewajiban pelaporan *Environmental, Social, and Governance* atau ESG. Regulasi seperti POJK 51/POJK.03/2017 menegaskan kewajiban bagi entitas bisnis untuk membuat *sustainability report* sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Melalui berbagai forum evaluasi dan pengembangan, standar pelaporan keberlanjutan terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi isu-isu material dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan (Anggraini et al., 2024).

Di samping aspek digitalisasi dan pengungkapan ESG, struktur pengelolaan entitas bisnis yang tercermin dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpean strategis dalam meminimalkan risiko terjadinya penghindaran pajak. Pada industri keuangan yang memiliki kompleksitas regulasi tinggi, isu penghindaran pajak menjadi sangat krusial untuk dikaji. Variasi dalam tingkat penerapan digitalisasi, kualitas pengungkapan ESG, dan efektivitas mekanisme tata kelola yang tercermin dalam laporan tahunan perusahaan mengindikasikan adanya perbedaan perilaku kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan tersebut.

Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kerugian negara yang disebabkan oleh lemahnya sistem tata kelola perusahaan menjadi bukti empiris tentang pentingnya pengawasan yang ketat dan komprehensif. Menurut (Asmeri et al., 2025)), Pada tahun 2020 BPK melakukan penyelidikan atas permintaan Agung terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan mengidentifikasi berbagai praktik yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses investasi saham dan reksa dana, yang berkontribusi pada kerugian sebesar Rp 16,8 triliun. Kasus-kasus serupa juga ditemukan pada PT ASABRI dan Bank Panin. Rangkaian fenomena ini menunjukkan urgensi untuk melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap struktur tata kelola suatu entitas usaha terkait potensinya dalam melakukan tindakan kecurangan, khususnya di sektor keuangan.

Kajian yang menganalisis secara menyeluruh keterkaitan antara digitalisasi pelaporan, pengungkapan ESG, dan tangka kepatuhan terhadap praktik penghindaran pajak di industri keuangan Indonesia masih sangat terbatas. Kesenjangan riset ini menjadi urgensi untuk diisi mengingat pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor internal perusahaan yang dapat mendorong atau justru menghambat praktik penghindaran pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi empat variabel utama dalam mengkaji pengaruhnya terhadap praktik mitigasi pajak di sektor keuangan. Berbeda dengan riset-riset sebelumnya yang membahas variabel-variabel tersebut secara terpisah, penelitian ini menekankan peran digitalisasi pelaporan sebagai elemen baru dalam meningkatkan transparansi dan menekan praktik penghindaran pajak di era transformasi digital. Fokus pada industri keuangan yang memiliki kompleksitas tinggi dimana di evaluasi rutin oleh OJK serta Bank Indonesia juga memperkuat nilai kebaruan penelitian ini karena memberikan bukti empiris yang relevan untuk peningkatan tata kelola dan kepatuhan pajak di sektor tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dapat menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menyebabkan sebuah konflik, terutama ketika manajemen memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjadi dasar penelitian karena praktik penghindaran pajak berpotensi muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Dalam situasi tersebut, manajemen dapat memanfaatkan celah regulasi pajak ketika pengawasan pemilik tidak kuat. Oleh karena itu, digitalisasi pelaporan, pengungkapan ESG, kepemilikan institusional, serta kepemilikan manajerial diposisikan sebagai mekanisme pengendalian yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Ketika pengawasan meningkat dan informasi lebih terbuka, peluang manajemen untuk bertindak oportunistik dalam menekan

beban pajak dapat diminimalkan, sehingga kebijakan perpajakan lebih sejalan dengan kepentingan pemilik.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar hukum. Tindakan ini dianggap aman karena tidak bertentangan dengan keentuan perpajakan yang berlaku. Strategi yang digunakan umumnya memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan guna membatasi jumlah pajak yang terutang (Moeljono, 2020).

Digitalisasi Pelaporan dan Penghindaran Pajak

Digitalisasi pelaporan memperkuat mekanisme pengawasan karena data keuangan tercatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh otoritas pajak secara real time, sehingga ruang manipulasi untuk menekan beban pajak semakin terbatas (OECD, 2025). Peningkatan transparansi tersebut juga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak regulator yang selama ini sering dimanfaatkan untuk melakukan praktik tax avoidance secara oportunistik (Septriani, 2022). Sejalan dengan teori keagenan, semakin tinggi tingkat monitoring dan keterbukaan informasi maka semakin kecil pula peluang agent melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, digitalisasi pelaporan diperkirakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₁: Digitalisasi pelaporan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

ESG *Disclosure* dan Penghindaran Pajak

Pengungkapan ESG merupakan cerminan dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kepatuhan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif karena berpotensi merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan public (Syahputri, 2025). Penerapan prinsip ESG yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang didukung oleh transparansi informasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan meminimalkan konflik antar pemangku kepentingan (Hoetama & Carolina, 2024) Hal ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam kebijakan perpajakan, sehingga pengungkapan ESG diperkirakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₂: ESG *disclosure* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional menjadi bagian dari *corporate governance* yang mencerminkan persentase saham oleh entitas keuangan. Kepemilikan saham oleh lembaga menjadi fundamental dalam mengawasi tindakan manajemen karena lembaga keuangan memiliki kemampuan kapabilitas tinggi untuk menilai kebijakan perusahaan, termasuk

perpajakan (Reswita et al., 2024). Motinoring mendalam dari pemegang saham institusional dapat membatasi ruang gerak perilaku spekulatif.

Selain itu, keberadaan pemegang saham institusional berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mampu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan (Sepika et al., 2024). Intervensi pihak institusional, manajemen akan terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati dan sesuai dengan sistem yang ada.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Ketika manajemen turut memiliki saham perusahaan, terjadi konvergensi kepentingan antara para pengambil keputusan eksekutif dengan pemilik modal. Mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas manajerial sekaligus meminimalkan insentif untuk melakukan aktivitas pengelakan pajak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap sustainability bisnis (Kusbandiyah, 2021).

Kepemilikan saham oleh manajer (kepemilikan manajerial) membantu menyamakan persepsi antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Akibatnya, manajer cenderung berperilaku lebih transparan dan etis, termasuk mengurangi risiko praktik pajak manipulatif yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas perusahaan di masa depan.

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dapat menekan praktik penghindaran pajak karena adanya penguatan pengawasan terhadap tindakan manajemen. Selain itu, digitalisasi pelaporan dan peningkatan transparansi melalui IFR terbukti mampu mengurangi asimetri informasi sehingga menurunkan peluang perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

Pengungkapan ESG juga ditemukan dapat mereduksi praktik penghindaran pajak karena perusahaan berupaya menjaga reputasi dan komitmen terhadap keberlanjutan. Namun, sebagian besar studi tersebut masih meneliti variabel-variabel tersebut secara terpisah dan tidak secara khusus berfokus pada sektor keuangan di Indonesia yang memiliki regulasi ketat serta tingkat adopsi digital yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji secara simultan pengaruh digitalisasi pelaporan, pengungkapan ESG, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan di BEI.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian,

baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Riset ini mengadopsi analisis regresi berganda berbasis data panel guna menguji hubungan kausal antara empat variabel kunci (digitalisasi laporan, pengungkapan ESG, kepemilikan institusi, dan kepemilikan insider) terhadap intensitas tax avoidance industri keuangan. Kerangka metodologis dirancang untuk meminimalkan bias dan memenuhi standar reproduktibilitas ilmiah.

Desain Penelitian

Pendekatan kuantitatif kausal digunakan untuk menguji hubungan antara digitalisasi pelaporan, pengungkapan ESG, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Berbasis data sekunder perusahaan sektor keuangan BEI periode 2021-2024, metode ini memungkinkan analisis hubungan kausal antarvariabel secara sistematis.

Populasi dan Sampel

Populasi riset mencakup 105 perusahaan sektor keuangan di BEI periode 2021-2024. Sektor ini dipilih disebabkan kapitalisasi strategis, kewajiban transparansi melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SE BI No. 14/14/PBI/2012, serta kompleksitas transaksi yang membuka peluang penghindaran pajak (Jiang et al., 2024). Teknik *purposive sampling* menghasilkan 17 perusahaan dari seleksi bertahap: 10 perusahaan *website* tidak dapat diakses, 52 tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan, 2 tidak menampilkan laba, dan 24 tidak memiliki data relevan. Total observasi mencapai 68 data ($n=17 \times 4$ tahun).

Jenis dan Sumber Data

Data dalam riset ini bersumber dari *annual report* perusahaan. Pemilihan data sekunder didasarkan pada pertimbangan bahwa informasi terpublikasi resmi dan melalui proses audit memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui Situs resmi BEI (IDX) dan situs web korporasi masing-masing perusahaan sampel yang menjamin keaslian dan validitas data penelitian. Data pendukung diperoleh dari penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Riset ini menerapkan pendekatan dokumentasi dalam pengumpulan data, dimana peneliti mengunduh dan menyusun data dari annual report selama periode observasi mulai 2021 hingga 2024. Dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat informasi relevan terkait digitalisasi laporan, pengungkapan ESG, struktur kepemilikan institusional dan manajerial, serta indikator penghindaran pajak. Data yang terkumpul kemudian diolah dan ditabulasi dalam format yang sesuai untuk analisis statistik menggunakan perangkat lunak SPSS.

Definisi Operasional Variabel

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Mkadmi & Ali, 2024). Variabel independen pertama adalah digitalisasi pelaporan yang mengukur pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan dan pajak perusahaan. Pengungkapan ESG mengukur keterbukaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola mengacu standar GRI. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham dimiliki institusi terhadap total saham beredar. Kepemilikan manajerial adalah tingkat saham dimiliki manajemen terhadap total saham listing. (Tambahani et al., 2021).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa Langkah untuk memastikan ketepatan dan keandalan hasil penelitian. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk meringkas dan mendeskripsikan karakteristik data penelitian menggunakan ukuran *central tendency* meliputi *mean*, *median* dan *mode*, serta ukuran persebaran (*dispersion*) menggunakan standar deviasi.

Tahap kedua adalah pengujian asumsi klasik untuk memastikan model regresi dengan syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan kriteria bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$ (Septriani, 2022). Uji multikolinearitas menggunakan indikator *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* dengan kriteria bebas multikolinearitas jika $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$ (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey* atau *Lagrange Multiplier* dengan syarat tidak terdapat autokorelasi jika nilai probabilitas $> 0,05$.

Tahap analisis ketiga menggunakan metode regresi multivariat guna menguji arah dan signifikansi determinan variabel prediktor terhadap variabel respons.

Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak (CETR)
- X_1 = Digitalisasi Pelaporan
- X_2 = Pengungkapan ESG
- X_3 = Kepemilikan Institusional
- X_4 = Kepemilikan Manajerial
- α = Konstanta
- β_{1234} = Koefisien regresi
- ε = *error term*

Tahap Keempat Uji-t mengkaji determinan individual setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan threshold signifikansi $\alpha=0.05$. Syarat penerimaan hipotesis mengacu pada Nilai $p\text{-value} \leq 0.05$, Statistik t-hitung melebihi nilai t-tabel (Sugiyono, 2019). Uji-F

dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengaruh kumulatif seluruh variabel independen. Model dianggap valid apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, tingkat signifikansi ≤ 0.05 . Koefisien R^2 berfungsi sebagai indikator persentase variasi variabel dependen dengan skala metrik 0-1. Seluruh analisis diproses menggunakan software SPSS untuk memvalidasi keandalan dan objektivitas hasil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Studi ini mengkhususkan analisis pada sektor perbankan dan institusi keuangan yang tercatat di BEI selama kurun waktu 2021-2024. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada signifikansi kontribusi sektor finansial terhadap stabilitas ekonomi nasional serta tingkat kepatuhan tinggi terhadap pengawasan ketat oleh OJK dan BI. Metode purposive sampling digunakan dengan tiga persyaratan utama: (1) ketersediaan laporan tahunan dan keberlanjutan, (2) kondisi profitabilitas positif, serta (3) kelengkapan data seluruh variabel penelitian.. Dari 105 perusahaan sektor keuangan di BEI, seleksi menghasilkan 68 data observasi yang memenuhi kriteria analisis. Sampel mencakup perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, memberikan representasi praktik pelaporan dan tata kelola sektor keuangan Indonesia.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penghindaran pajak menunjukkan rata-rata 0,2307 (SD=0,2083), mengindikasikan tingkat wajar dengan kepatuhan tinggi akibat pengawasan ketat otoritas terhadap sektor keuangan. Digitalisasi pelaporan mencapai rata-rata 2,84 (SD=0,971), menunjukkan mayoritas perusahaan telah mengadopsi sistem digital sejalan dengan transformasi global, dengan variasi besar antara institusi besar dan menengah-kecil. Pengungkapan ESG memiliki rata-rata 0,6243 (SD=0,1375), mencapai 60% indikator dengan konsistensi tinggi didorong regulasi OJK. Kepemilikan institusional mendominasi dengan rata-rata 0,7533 (SD=0,2244) karena bisnis keuangan membutuhkan modal besar. Kepemilikan manajerial terendah 0,0530 (SD=0,1489), mencerminkan pemisahan jelas fungsi pengelolaan dan kepemilikan.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk Mengetahui distribusi data residual digunakan uji Kolmogorov-Smirnov Melalui transformasi logaritma natural menunjukkan hasil normalitas. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi 0,152 ($> 0,05$), mengindikasikan data residual berdistribusi normal setelah transformasi logaritma natural (LN). Transformasi dilakukan karena data awal tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk memperoleh distribusi yang mendekati normal. Pemenuhan asumsi normalitas penting untuk memastikan validitas estimasi parameter dan pengujian hipotesis dalam analisis regresi. Analisis visual melalui histogram dan

Normal P-P Plot memperkuat hasil uji statistik. Gambar 1 menampilkan histogram distribusi residual terstandarisasi kurva normal dengan mean mendekati nol (-5,38E-17) dan standar deviasi 0,970.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan mendeteksi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian dengan nilai signifikansi pengungkapan ESG 0,681, kepemilikan institusional 0,658, dan kepemilikan manajerial 0,439, semuanya di atas 0,05, mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna mendeteksi Interkorelasi yang signifikan antar variabel penjelas. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas yang menunjukkan total variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, mengkonfirmasi tidak terjadi Hubungan linier yang erat antara variabel bebas

Digitalisasi pelaporan menunjukkan Tolerance 0,743 dan VIF 1,347. Pengungkapan ESG memiliki Tolerance 0,829 dan VIF 1,206. Kepemilikan institusional menunjukkan Tolerance 0,466 dan VIF 2,148. Kepemilikan manajerial memiliki Tolerance 0,543 dan VIF 1,842. Dapat disimpulkan bahwa model regresi terhindars dari multikolinearitas, memastikan setiap variabel independen memberikan kontribusi unik terhadap model.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menguji keterkaitan kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1. Tabel 7 menyajikan hasil uji autokorelasi dengan nilai *Durbin-Watson* 0,848, mengindikasikan kemungkinan autokorelasi positif.

Meskipun nilai *Durbin-Watson* mengindikasikan kemungkinan autokorelasi positif, mengingat penelitian menggunakan data *cross-sectional* dengan periode tidak sepenuhnya berurutan, masalah ini tidak terlalu kritis dan masih dapat ditoleransi dalam interpretasi hasil penelitian.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Mengetahui sejauh mana faktor-faktor penentu mempengaruhi hasil, digunakan pendekatan statistik regresi dengan multiple predictor. Tabel 8 menyajikan hasil analisis regresi yang menghasilkan persamaan model.

Dari hasil analisis, dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda: $Y = 0,362 - 0,080X_1 + 0,081X_2 + 0,072X_3 - 0,175X_4 + \epsilon$. Konstanta 0,362 menunjukkan tanpa pengaruh variabel independen, tingkat penghindaran pajak sebesar 36,2%. Koefisien digitalisasi pelaporan -0,080 mengindikasikan setiap peningkatan satu satuan digitalisasi menurunkan penghindaran pajak 8%, mencerminkan efektivitas transparansi digital dalam meminimalkan celah

penghindaran pajak. Pengungkapan ESG memiliki koefisien 0,081 menunjukkan hubungan positif. Kepemilikan institusional dengan koefisien 0,072 menunjukkan hubungan positif. Kepemilikan manajerial dengan koefisien -0,175 menunjukkan hubungan negatif.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilaksanakan guna mengidentifikasi dampak individual setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model penelitian. Tabel 9 menyajikan hasil uji t untuk setiap hipotesis penelitian. Digitalisasi pelaporan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak ($t=-2,713$; $p=0,009$), mengkonfirmasi H_1 . Sistem digital meningkatkan transparansi dan mempersulit praktik penghindaran pajak agresif melalui *audit trail* yang lebih baik. Pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan ($t=0,413$; $p=0,681$), menolak H_2 , mengindikasikan pengungkapan ESG belum terintegrasi dengan strategi pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan ($t=0,445$; $p=0,658$), menolak H_3 , karena fokus investor pada kinerja jangka pendek. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan ($t=-0,779$; $p=0,439$), menolak H_4 , akibat proporsi rendah (5,3%) yang meminimalkan *insentif alignment*.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh gabungan semua prediktor terhadap variabel respon dalam model regresi. Tabel 10 menampilkan hasil uji F. Hasil pengujian menunjukkan F-hitung 2,073 dengan signifikansi 0,095 ($> 0,05$), mengindikasikan secara bersama-sama keempat variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pelaporan secara individual berpengaruh signifikan, kombinasi seluruh variabel tata kelola belum mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak secara komprehensif.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian R-squared dilaksanakan guna mengkuantifikasi proporsi varian variabel terikat yang dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam model. Tabel 11 menyajikan hasil uji R^2 .

Nilai *Adjusted R Square* 0,060 atau 6% menunjukkan variabel independen hanya menjelaskan 6% variasi penghindaran pajak, sedangkan 94% dijelaskan faktor lain di luar model. Rendahnya nilai koefisien determinasi mengindikasikan kompleksitas fenomena penghindaran pajak yang dipengaruhi berbagai faktor seperti strategi perencanaan pajak, karakteristik industri, tarif pajak efektif, intensitas modal, dan lingkungan regulasi yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Meskipun demikian, signifikansi digitalisasi pelaporan memberikan implikasi praktis penting bagi regulator dan praktisi dalam merancang kebijakan

peningkatan kepatuhan pajak melalui transformasi digital sistem pelaporan keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Riset ini menganalisis pengaruh digitalisasi pelaporan, pengungkapan ESG, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Hasil pengujian terhadap 68 observasi dari 17 perusahaan menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien regresi sebesar -0,080 dan tingkat signifikansi 0,009. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan tingkat digitalisasi dalam sistem pelaporan keuangan mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui mekanisme peningkatan transparansi, penciptaan jejak audit yang komprehensif, dan pengurangan asimetri informasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan. Sebaliknya, pengungkapan ESG, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengungkapan ESG dengan nilai signifikansi 0,681 mengindikasikan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan belum terintegrasi secara substantif dengan kebijakan perpajakan perusahaan dan masih cenderung bersifat *ceremonial* untuk memenuhi tuntutan regulasi.

Kepemilikan institusional yang mendominasi struktur kepemilikan dengan rata-rata 75,33% ternyata tidak efektif dalam mengawasi praktik perpajakan perusahaan, kemungkinan disebabkan oleh fokus investor institusional pada kinerja jangka pendek dan adanya hubungan afiliasi yang mengurangi independensi pengawasan. Kepemilikan manajerial yang sangat rendah dengan rata-rata hanya 5,30% menyebabkan mekanisme *alignment of interest* tidak berfungsi optimal karena manajemen tidak memiliki partisipasi dominan dalam mengakomodir pengelola saham dalam aspek kepatuhan pajak. Uji multivariat menghasilkan p-value 0,095, mengindikasikan bahwa kombinasi keempat variabel independen tidak menunjukkan efek yang signifikan dalam model. dan koefisien determinasi yang sangat rendah sebesar 6%, mengindikasikan bahwa model penelitian baru menangkap sebagian kecil dari kompleksitas fenomena penghindaran pajak di sektor keuangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

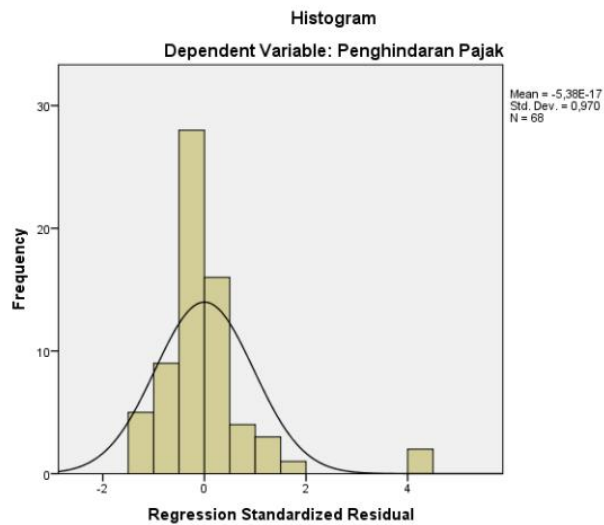
- Adelia Kristina Manullang. (2024). *Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, And Governance (Esg) Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)*. 13, 1–13.
- Anggraini, P. W., Darma, T., & Sari, R. (2024). *Pengaruh Environment Social Governance (ESG) Score Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terindeks IDX ESG Leader Tahun 2020-2023*. 5(5), 975–982.
- Asmeri, R., Yani, M., & Wahyuni, S. (2025). *Pengaruh Akuntansi Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan*

- Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2023*. 5(1), 80–91.
- Hoetama & Carolina. (2024). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan ESG sebagai Variabel Pemoderasi*. 13(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kusbandiyah, A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical Di Bursa Efek Indonesia*. 71(1), 63–71.
- Mkadmi, J. E., & Ali, W. Ben. (2024). How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies? *Journal of Economic Criminology*, 5(April), 100070. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100070>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- OECD. (2025). Consolidated text of the Common Reporting Standard (2025). *Consolidated Text of the Common Reporting Standard (2025)*. <https://doi.org/10.1787/055664b1-en>
- Reswita, Y., Lukman, S., Febrianto, R., & Adrianto, F. (2024). Tax Avoidance on Institutional Ownership: Case Study of Banking Companies in Indonesian Capital Market. *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 19(2), 188–198.
- Sepika, S., Taufik, K., & Nurmansyah, N. (2024). The Effect of Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners and Profitability on Tax Avoidance in Technology Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 6(4), 1742–1758.
- Septriani, Y. (2022). *Does Internet Financial Reporting Reduce Information Asymmetry?* (Vol. 2, Issue 1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/rafgo>
- Syahputri, A. (2025). The Impact of ESG Performance and Financial Constraint on Tax Avoidance: Evidence from ASEAN 5. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 17(1), 102–117.
- Tambahani, G. D., Sumual, T., Kewo, D. C., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh perencanaan pajak (tax panning) dan penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap nilai perusahaan (studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 142–154.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

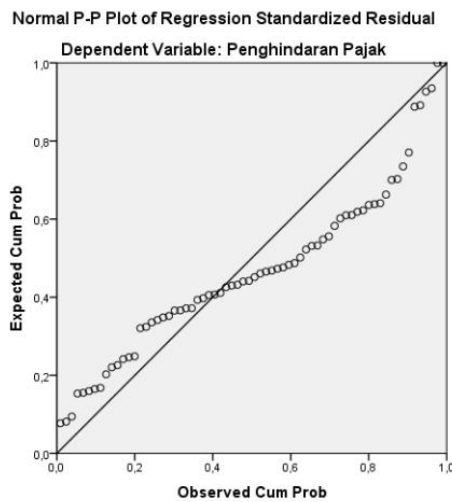
GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan	Saham	Papan Pencatatan
1	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	06 Jul 1989	620.806.680	PEMANTAUAN KHUSUS
2	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance T	31 Mar 2004	1.000.000.000	PENGEMBANGAN
3	AGRO	Bank Raya Indonesia Tbk.	08 Agt 2003	24.493.093.216	UTAMA
4	AGRS	Bank IBK Indonesia Tbk.	22 Des 2014	47.367.057.874	PENGEMBANGAN
5	AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama Tb	14 Sep 1990	4.900.000.000	PENGEMBANGAN
6	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	23 Des 2005	5.001.552.516	PENGEMBANGAN
7	APIC	Pacific Strategic Financial Tb	18 Des 2002	11.766.313.488	PENGEMBANGAN

Gambar 1. Dokumentasi Pengumpulan Data



Gambar 2. Histogram



Gambar 3. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	105
2	Perusahaan yang websitenya tidak dapat diakses	(10)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>)	(52)
4	Perusahaan yang tidak menampilkan laba	(2)
5	Perusahaan yang tidak memiliki data yang relevan dan tidak dapat diukur terkait variabel digitalisasi pelaporan, <i>ESG disclosure</i> , kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial	(24)
Jumlah Perusahaan Yang Dijadikan Sampel		17
Jumlah Data Penelitian (17 × 4 tahun)		68

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator/Proksi	Skala
Penghindaran Pajak (Setiawan, 2016)	Upaya perusahaan menekan beban pajak secara legal	CETR = Pajak dibayar / Laba sebelum pajak	Rasio
Digitalisasi	Pemanfaatan teknologi	1. Laporan Tahunan dan Keberlanjutan	Nominal

Pelaporan (Klaudia & Muniroh, 2024)	digital dalam pelaporan keuangan & pajak	tersedia di web perusahaan 2. Adopsi sistem ERP 3. Perangkat lunak akuntansi berbasis <i>cloud</i> 4. Integrasi sistem keuangan	
ESG disclosure (Ayuwandari, 2020)	Tingkat pengungkapan aspek lingkungan dan sosial	ESG Index (Mengacu kepada GRI)	Rasio
Kepemilikan Institusional (Putri et al., 2024)	Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan, investor luar negeri maupun bank	(Saham yang dimiliki institusional / Jumlah saham yang beredar) × 100%	Rasio
Kepemilikan Manajerial (Prastiyanti & Mahardhika, 2022)	Proporsi saham yang dimiliki pihak manajemen untuk menunjukkan keterlibatannya	(Saham yang dimiliki manajerial / Jumlah saham yang beredar)	Rasio

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Penghindaran Pajak	0,23065726	0,208312059	68
Digitalisasi Pelaporan	2,84	0,971	68
ESG Disclosure	0,62433155	0,137520658	68
Kepemilikan Institusional	0,75334143	0,224419000	68
Kepemilikan Manajerial	0,05296415	0,148929599	68

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

Keterangan	LN
N	26
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	-2,6504
Std. Deviation	1,43621
Most Extreme Differences	
Absolute	0,147
Positive	0,078
Negative	-0,147
Test Statistic	0,147
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,152 ^{c^}

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0,362	0,166	-	2,176	0,033	-	-
Digitalisasi Pelaporan	-0,080	0,029	-0,373	-2,713	0,009	0,743	1,347
ESG Disclosure	0,081	0,197	0,054	0,413	0,681	0,829	1,206
Kepemilikan Institusional	0,072	0,161	0,077	0,445	0,658	0,466	2,148
Kepemilikan Manajerial	-0,175	0,225	-0,125	-0,779	0,439	0,543	1,842

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.	Beta			Tolerance	VIF

		Error					
(Constant)	0,362	0,166	-	2,176	0,033	-	-
Digitalisasi Pelaporan	-0,080	0,029	-0,373	-2,713	0,009	0,743	1,347
ESG Disclosure	0,081	0,197	0,054	0,413	0,681	0,829	1,206
Kepemilikan Institusional	0,072	0,161	0,077	0,445	0,658	0,466	2,148
Kepemilikan Manajerial	-0,175	0,225	-0,125	-0,779	0,439	0,543	1,842

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi (Model Summary^b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,341 ^a	0,116	0,060	0,201944893	0,848

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	0,362	0,166	-		2,176	0,033	-	-
Digitalisasi Pelaporan	-0,080	0,029	-0,373		-2,713	0,009	0,743	1,347
ESG Disclosure	0,081	0,197	0,054		0,413	0,681	0,829	1,206
Kepemilikan Institusional	0,072	0,161	0,077		0,445	0,658	0,466	2,148
Kepemilikan Manajerial	-0,175	0,225	-0,125		-0,779	0,439	0,543	1,842

Tabel 9. Hasil Uji t (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	0,362	0,166	-		2,176	0,033	-	-
Digitalisasi Pelaporan	-0,080	0,029	-0,373		-2,713	0,009	0,743	1,347
ESG Disclosure	0,081	0,197	0,054		0,413	0,681	0,829	1,206
Kepemilikan Institusional	0,072	0,161	0,077		0,445	0,658	0,466	2,148
Kepemilikan Manajerial	-0,175	0,225	-0,125		-0,779	0,439	0,543	1,842

Tabel 10. Hasil Uji F (ANOVA^a)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,338	4	0,085	2,073	0,095 ^b
Residual	2,569	63	0,041	-	-
Total	2,907	67	-	-	-

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Model Summary^b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,341 ^a	0,116	0,060	0,201944893	0,848